



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI TAHUN 2023

KOMPLEK PERKANTORAN PEMKOT CIMAHI GEDUNG PRAJA WIBAWA
Jl. Raden Demang Hardjakusumah
Telp./Fax. 022-6642209 Kota Cimahi 40513

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.2.1 Maksud	3
1.2.2 Tujuan	3
1.3. Gambar Umum dan Organisasi	3
1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.4.1 Kedudukan	5
1.4.2 Tugas Pokok.....	6
1.4.3 Fungsi	6
1.5. Struktur Organisasi	7
1.6. Sumber Daya	8
1.7. Dasar Hukum	10
1.8. Sistematika Penyajian	13
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	 15
2.1. Rencana Strategis.....	15
2.1.1. Target Ketentraman dan Ketertiban Umum	16
2.1.2. Pelayanan SPM Satpolppdamkar Cimahi.....	17
2.1.3. Arah Kebijakan Umum dan Strategi	18
2.1.4. Tujuan	19
2.1.5. Sasaran.....	20
2.1.6. Prioritas Kerja.....	20
2.2. Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja	21
2.2.1. Indikator Kinerja	22
2.2.2. Program dan Kegiatan	26
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 28
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
3.2. Pengukuran Kinerja.....	32
3.3. Capaian	33
3.3.1. Analisis Capaian Kinerja.....	38
3.3.2. Realisasi Anggaran	47
 BAB IV PENUTUP	 57

DAFTAR TABEL

2.1.	Target Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	16
3.1.	Target indikator Kinerja Utama Satpolppdamkar TA. 2023	30
3.2.	Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama	
3.3.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	31
3.4.	Target Satpolpp dan Damkar Periode 2023-2026	33
3.5.	Capaian Satpolpp dan Damkar Periode 2023-2026	33
3.6.	Realisasi Satpolpp dan Damkar Periode 2018-2023	34
3.7.	Perhitungan Perbandingan capaian tahun 2022 dengan 2023	37
3.8.	Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2023.....	36
3.9.	Evaluasi Pencapaian Sasaran Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah (Indikator Kinerja : Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah).....	39
3.10.	Evaluasi Pencapaian Sasaran Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah (Indikator Kinerja : Persentase Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang Aktif).....	40
3.11.	Evaluasi Pencapaian Sasaran Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah (Indikator Kinerja : Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Diselesaikan)	42
3.12.	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran.....	44
3.13.	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Upaya Penyelamatan Korban Kebakaran dan Bencana Lainnya.....	45
3.14.	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat.....	45
3.15.	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran Melalui Pemberdayaan Masyarakat	46
3.16.	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi	49

DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.....	8
2.1	Rencana Kinerja Tahunan (Perubahan) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2023.....	23
2.2	Sasaran Program Dalam Pohon Kinerja Satpolppdamkar 2023.....	25
3.1	Grafik Realisasi Satpolpp dan Damkar Periode 2018-2023.....	34
3.2	Grafik Perhitungan Perbandingan capaian 2022 dan capaian 2023...	35

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Dengan telah tersusunnya LKIP Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi tahun 2023 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2023.

Penyusunan LKIP Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi ini telah dipayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKIP Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi tidak terlepas dari kekurangan, sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi telah mengupayakan untuk mengatasi kendalakendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Demikian, Semoga LKIP Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi ini telah dapat mencerminkan kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi tahun 2023

dan bermanfaat bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat, dengan pelayanan yang semakin baik.

Cimahi, Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI**



Ganis Komariantio, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196409011987031021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Pemerintah yang baik (Good Government) merupakan tuntutan yang paling aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada Pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik merupakan implikasi meningkatnya pengetahuan dan pengaruh globalisasi. Kondisi demikian menuntut perubahan paradigma dan pelayanan publik yang menghendaki adanya perilaku pemerintah yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Begitu pula dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi yang tidak terlepas dari tuntutan publik tersebut. Sebagai garda terdepan Pemerintah Kota Cimahi dengan pertumbuhan cepat dan strategis, maka Satpolppdamkar mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk memberikan pelayanan baik kepada Pemerintah maupun masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpolppdamkar Kota Cimahi Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau *minimal outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Satpolpdamkar Kota Cimahi Tahun 2023 dengan 3 Program, kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 2 (Dua) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hal ini berarti Satpol PP dan Damkar sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkewajiban menyusun LKIP untuk menggambarkan capaian kinerja organisasi.

Laporan Kinerja dimaksud merupakan hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan

dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2023 juga sebagai bahan evaluasi tahun 2023 melihat evaluasi tahun 2022 serta apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 agar lebih terukur dan terencana dengan baik.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi capaian kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2023 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menjadi tonggak perubahan sistem pemerintahan, dari sentralistik menjadi desentralistik terbatas atau lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Salah satu konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah adalah adanya perubahan yang sangat mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan terutama pemerintah daerah, dimana otonomi daerah benar-benar ditujukan dan diterapkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, bukan lahan baru dalam korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat memenuhi tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* atau tata kelola yang baik, dimana Bank Dunia mendefinisikan sebagai berikut :

“suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”
(www.transparansi.or.id)

Dengan demikian, harus ada perubahan paradigma berpikir dilingkungan pemerintahan kearah yang lebih baik, yang berujung pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Berbicara pelayanan prima, mayoritas masyarakat akan berfikir mengenai perijinan yang tidak bertele-tele, KTP gratis, puskesmas gratis, aparat kelurahan yang sigap, atau mungkin kepala daerah yang akrab dengan rakyatnya. Jarang sekali mereka mengaitkannya dengan penegakan peraturan daerah (Perda) yang optimal, sehingga masyarakat merasa aman, nyaman dan tertib. Hal ini dikarenakan, dalam proses pelaksanaan penegakan Perda, masyarakat masih cenderung hanya

menjadi objek yang tingkat partisipasinya rendah sekali. Maka dipandang perlu untuk melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan kepada Peraturan Menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Satpolppdamkar masuk bidang ketentraman dan ketertiban umum, sejauh mana melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam ketertiban umum serta pelayanan evakuasi bencana kebakaran yang terjadi di wilayah kota cimahi. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa urusan sub urusan Pemadam Kebakaran merupakan bagian atau rumpun dari urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1.4.1. Kedudukan

Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Pasal 31 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

dan Sub Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.4.2. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.4.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

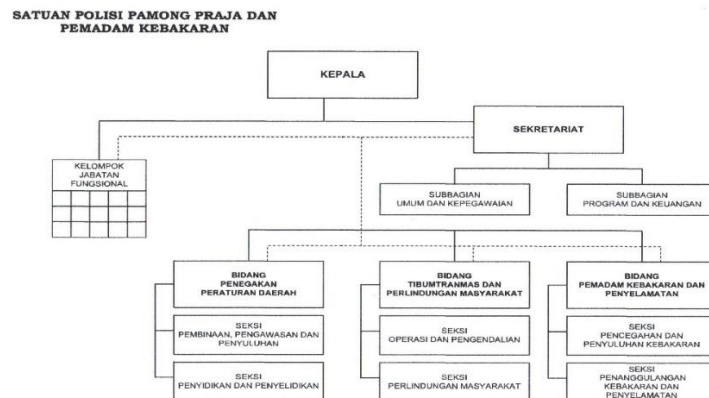
1.5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi mengacu pada Pasal 34 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, terdiri atas :

- 1. Kepala Satuan ;
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program dan Keuangan.
- 3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
- 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.

5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; dan
 - b. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi

1.6. Sumber Daya

Dalam rangka mendukung pelaksana:

Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi memiliki sumber daya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada saat LKIP Tahun 2023 ini disusun, kondisi SDM Satpol PP dan Damkar per Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi			
1.	Pegawai Negeri Sipil	116	
2.	Tenaga Harian Lepas	83	
	Jumlah	199	

2. Sarana dan Prasarana Operasional

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Kr. Ops. Patroli Roda 2 (Trail)	15 Unit	2 Rusak
2	Kr. Ops. Pamwal/Pamtup Roda 2 (Moge)	2 Unit	Baik
3	Kr. Operasional Roda 4 (Minibus)	1 Unit	Baik
4	Kr. Operasional Roda 4 (Pick up)	6 unit	1 Rusak
5	Kr. Operasional Roda 6 (Truck Dalmas)	2 Unit	Baik
6	Kr. Operasional Roda 6 / Lebih (Damkar)	12 Unit	2 Tidak Layak
7	Kr. Operasional Roda 2 (Damkar)	1 Unit	Baik
8	Kr. Operasional Roda 2 (Patroli)	9 Unit	Baik
9	Pakaian Anti Huru Hara	40 Set	Baik
10	Pentungan	23 Buah	Baik
11	Rompi Anti Senjata Tajam	40 Buah	Baik
12	Handy Talky	20 Buah	Baik
13	Tenda Pleton	3 Buah	Baik
14	Alat Komunikasi (Damkar)	23 Buah	5 Rusak
15	Mesin Pompa sibahura	1 Buah	Baik
16	Mesin Pompa Honda	1 Buah	Rusak
17	Mesin Pompa Honda	1 Buah	Baik
18	Mesin Pompa firman	1 Buah	Baik
19	Mesin Apung	1 Buah	Rusak
20	Sarung Tangan	69 Buah	1 Rusak
21	Karmantel 200 M	69 Buah	1 Rusak
22	Mesin Pengisian BA	2 Buah	1 Rusak
23	Mesin Hydraulic	2 Buah	1 Rusak

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
24	Chain swaw Merk sthii	2 Buah	1 Rusak
25	Chain shaw merk husqvarna	2 Buah	1 Rusak

1.7. Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Satpol PP dan Damkar Tahun 2022 merujuk pada sejumlah peraturan yang berlaku pada saat disusunnya dokumen ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/2008 tentang Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);

16. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);

1.8. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi selama Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, dasar hukum, serta sistematika penyajian LKIP;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Satpol PP dan Damkar Tahun 2023 meliputi RPD 2023-2026, Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Tahun 2023-2026, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Satpol PP dan Damkar Tahun 2023.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Satpol PP dan Damkar dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023 dan menjelaskan Akuntabilitas Keuangan Satpol PP dan Damkar dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Anggaran Tahun 2023.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2023, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Pasal 33, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diberikan tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
2. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
4. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi ;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Strategis (Renstra) 2023 – 2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Penetapan Kinerja

(Tapkin) Tahun 2023, dimana terhadap dokumen tersebut telah dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi dan kebutuhan real saat ini.

2.1.1 Target Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 2.1

Target Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN KINERJA	TARGET
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh Pemadam Kebakaran I + Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan II	100%

2.1.2 Pelayanan SPM Satpolppdamkar Cimahi

Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten /Kota yang diampuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran terdapat 2 jenis pelayanan dasar, yaitu :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum;
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Berkaitan dengan perumusan misi Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2023-2026 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan visi yang telah ditetapkan oleh Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi yang tercantum dalam RPD 2023-2026 terdapat pada Misi 2 Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik ,Adapun misi yang diangkat Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dalam Renstra Perubahan 2023-2026, yaitu sebagai berikut :

M1 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;

M2 : Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik;

2.1.3 Arah Kebijakan Umum dan Strategi

Berdasarkan visi dan misi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi sebagaimana tertuang dalam Renstra Perubahan Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi 2023-2026, maka ditetapkan pula beberapa kebijakan umum dan strategi untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu meliputi:

Misi Ke-	Kebijakan Umum	Strategi
M1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Misi Ke-	Kebijakan Umum	Strategi
		Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
		Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran
M2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik;	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi SATPOLPP-DAMKAR

2.1.4 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka perlu dirumuskan langkah-langkah yang lebih terarah dalam bentuk tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan juga merupakan pernyataan – pernyataan berkenaan dengan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai visi, serta memudahkan pelaksanaan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari misi tersebut di atas, Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

- T1 : Terciptanya Ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- T2 : Meningkatnya Pelayanan Publik di bidang Pemadam Kebakaran dalam penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

2.1.5 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Satpol PP dalam jangka waktu tahunan (1 tahun). Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Penetapan sasaran mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi telah menetapkan sasaran sebagai berikut :

- T1S1 : Terselenggaranya administrasi yang tertib dan tersedianya sarana prasarana yang memadai.
- T1S2 : Meningkatnya kinerja Pemerintah Kota Dalam Pembangunan dengan pelayanan publik di bidang Kebakaran dalam penyelamatan kebakran dan Non Kebakaran.

2.1.6 Prioritas Kerja

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 merupakan tahun kesatu pelaksanaan Renstra bagi Satpol dan Damkar Kota Cimahi tahun 2023-2026, dimana isi program, kegiatan, indikator, dan target capaian kinerja sudah disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya. Adapun prioritas kerja Satpol PP pada tahun terakhir Renstra 2023-2026 difokuskan pada Penegakan Perda, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Sedangkan prioritas kerja Damkar pada tahun 2022 yaitu peningkatan pengendalian dan monitoring wilayah rawan kebakaran. Prioritas kerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dilaksanakan sebagai upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Cimahi.

2.2 Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Rencana kinerja juga merupakan sebuah kontrak atau kesepakatan terhadap kinerja yang akan diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dalam Rencana Kinerja yang ditetapkan, terdapat rencana capaian kinerja seluruh indikator sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, didukung dengan rencana capaian berupa Program, Kegiatan, serta kelompok indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya.

Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja akan menjadi dokumen acuan dalam pengukuran pencapaian target kinerja setiap akhir periode, dimana pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasinya.

Penetapan kinerja Satpol PP dan Damkar Tahun 2023 ditandatangani oleh Kasatpol PP dan Damkar dengan diketahui dan disetujui oleh Walikota Cimahi. Dalam penetapan kinerja Perubahan 2023 ditetapkan 2 sasaran yang merupakan sasaran utama yang tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan 2023-2026. Adapun yang menjadi sasaran dalam Penetapan Kinerja tahun 2023, sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- 2) Meningkatnya kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

2.2.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama instansi pemerintah yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta transparan guna menghasilkan informasi kinerja yang baik.

Indikator kinerja menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Adapun indikator kinerja Satpol PP dan Damkar tahun 2023 dapat dilihat pada tabel Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagai berikut :

Gambar 2.1.

**Rencana Kinerja Tahunan (Perubahan) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Cimahi
Tahun 2023**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GANIS KOMARIANTO, S.E., M.Si.**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.**
Jabatan : Pj. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

Pihak Kedua, Pj. WALI KOTA CIMAHI,  Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.	Pihak Pertama, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI,  GANIS KOMARIANTO, S.E., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19640901 198703 1 021
--	---

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100%
		Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	800
		Waktu Respon tanggap kebakaran	15 Menit
2.	Meningkatnya kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Satpolppdamkar	60,73

Program

Anggaran

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 21.036.013.302,00
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 8.831.785.200,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 1.860.188.300,00
Jumlah Anggaran		Rp 31.727.986.802,00

Cimahi, November 2023

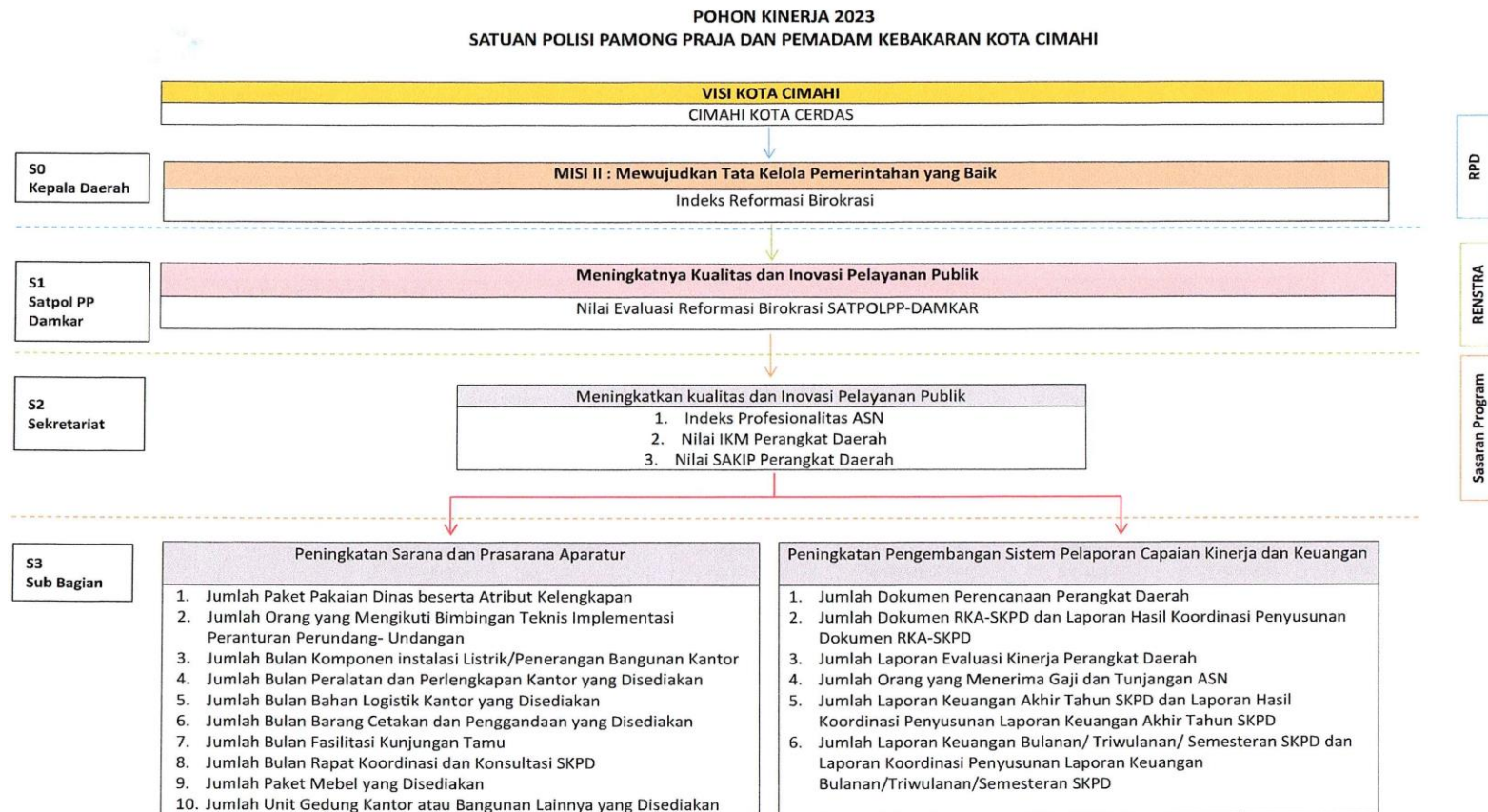
Pj. WALI KOTA CIMAHI,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI,**


Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.


GANIS KOMARIANTO, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 021

Gambar 2.2
Sasaran Program Dalam Pohon Kinerja Satpolppdamkar 2023



2.2.2 Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, maka harus dijabarkan dalam suatu program dan kegiatan. Ruang lingkup kegiatan Satpol PP dan Damkar pada tahun 2023 disesuaikan dengan lingkup permasalahan yang dihadapi dan kemampuan keuangan daerah. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4) Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- 5) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
- 6) Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- 7) Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan
- 8) Kegiatan Pengadaan Mebel
- 9) Kegiatan Pengadaan Gedung kantor dan Bangunan lainnya
- 10) Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 11) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 12) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 13) Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
- 14) Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu
- 15) Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 16) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 17) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 18) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 19) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 20) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 21) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 22) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

B. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- 1) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan MassaPengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban UmumPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan PerkadaPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- 5) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

C. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PEMYELAMATAN NON KEBAKARAN

- 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- 4) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- 5) Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- 6) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Implementasi arah kebijakan pembangunan Nasional dibidang aparatur negara, diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui penataan fungsi – fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dan responsif. Hal tersebut ditunjang dengan optimalisasi dokumen pelaporan kinerja sebagai bentuk penyelesaian tugas dan fungsi pemerintahan, yang diimplementasikan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pelayanan umum, serta peningkatan transparansi dan partisipasi, sehingga pada akhirnya akan terselenggara *good governance* sebagai prasyarat bagi setiap pemerintahan guna mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pelaporan kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang memberikan informasi kegiatan yang harus dilakukan dan diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun. Bentuk perencanaan tersebut harus mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintahan dapat mudah menyelaraskan visi dan misi kepala daerah sesuai dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas instansi pemerintah yang dituangkan dalam pelaporan kinerja, tidak hanya sekedar pengisian formulir semata, namun dimaksudkan untuk lebih menekankan perubahan paradigma aparatur dari yang hanya berorientasi pada menghabiskan input terutama anggaran menjadi berorientasi kepada hasil atau result. Dengan demikian akan ada kesadaran yang melekat kuat dalam setiap aparatur mengenai pentingnya menyampaikan laporan akuntabilitas dan wajibnya upaya meningkatkan kinerja sesuai dengan amanah yang diemban.

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2023 – 2026, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang

diterima Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kota Cimahi.

Beberapa Acuan kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :

Target Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 3.1

Target indikator Kinerja Utama Satpolppdamkar TA. 2023

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pesentase Response Time 15 Menit dalam Pemyelamatan Kebakaran	100%

Tabel 3.2
Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	keterangan
1	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	1.Menurunnya Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum
			2.Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota Cimahi 3.Angka Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Jumlah anggota linmas dibagi penduduk kota cimahi Angka Pelanggaran Perda dan Perkada Maksimal 800 kasus pada tahun 2023
2	Menurunkan Jumlah Kejadian Kebakaran	Meningkatnya Kesiapsiagaan Tanggap Kebakaran	1.Persentase Kawasan Pemukiman Siaga Kebakaran 2.Tingkat Tanggap Darurat Penanganan Kebakaran	Jumlah Peserta magakar dibagi luas wilayah keseluruhan dikali 100% Jumlah penerimaan laporan dibagi jumlah pelayanan

3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan jawaban perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang dapat diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 85$: Sangat Berhasil

$70 > X < 85$: Berhasil

$55 > X < 70$: Cukup Berhasil

$X < 55$: Tidak Berhasil

3.3 Capaian

Adapun realisasi Satpolpp dan Damkar dalam pencapaian pelaksanaan urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Target Satpolpp dan Damkar Periode 2023-2026

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET				Capaian 2022 (%)
		2023	2024	2025	2026	
		(%)	(%)	(%)	(%)	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	97.30

Tabel 3.5

Capaian Satpolpp dan Damkar Periode 2023-2026

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN				Capaian 2022 (%)
		2023	2024	2025	2026	
		(%)	(%)	(%)	(%)	

1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	-	-	-	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97,85	-	-	-	97.30

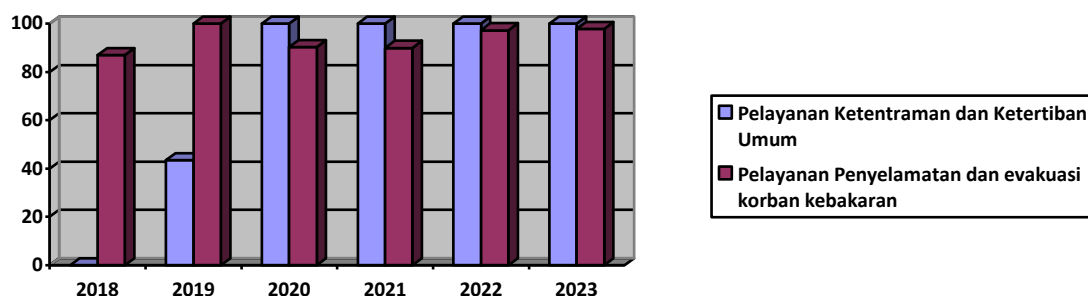
Tabel 3.6

Realisasi Satpolpp dan Damkar Periode 2018-2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN					2023
		2018	2019	2020	2021	2022	
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	43,52	100	100	100	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	86,96	100	90,24	90	97,3	97,8

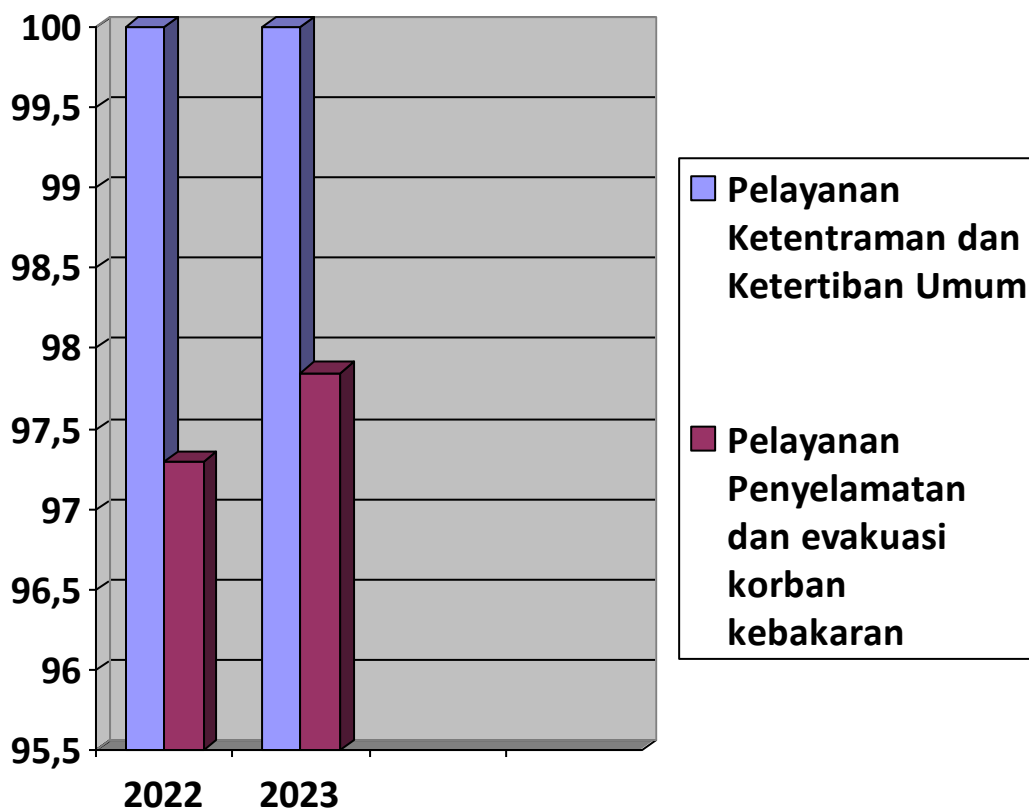
Gambar 3.1

Grafik Realisasi Satpolpp dan Damkar Periode 2018-2023



Tabel 3.7**Perhitungan Perbandingan capaian tahun 2022 dengan 2023**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN		HASIL CAPAIAN
		2022	2023	2023
1	2	3	4	($= \frac{4-3}{3} \times 100$)
		(%)	(%)	(%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	0 = 100
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97,30	97,85	+0,60

Gambar 3.2**Grafik Perhitungan Perbandingan capaian 2022 dan capaian 2023**

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2023

N O	URAIAN KEGIATAN	TARGET / RENCANA	TW 1 2023	TW 2 2023	TW 3 2023	TW 4 2024	TOT AL TAH UN 2023	SATU AN	CAPAIAN 2023
			REALI SASI	REALI SASI	REALI SASI	REALI SASI			
1	Pengaduan Trantibum Yang Ditangani	100% (Jumlah Pengaduan/J umlah Penyelesaian)	0	5	6	6	17	ORA NG	100%
2	Jumlah Satlinmas Kota Cimahi	Jumlah RT*2orang (1728*2=345 6)	1871	1871	1871	1871	1871	ORA NG	54,14%
3	Jumlah Satlinmas Kota Cimahi yang telah mendapatkan pembinaan	1871	50	50	50	0	150	ORA NG	8,02%
4	Perda Perkada yang ditegakkan	Jumah Masyarakat terkena sanksi atas pelanggaran perda/perkad a	17	18	12	11	58	ORA NG	100%
5	Jumlah Kapasitas PPNS	Jumlah PPNS	19	17	17	17	17	ORA NG	

6	Relawan Kebakaran melalui pembinaan Sosialisasi dan Latihan Di Bawah Binaan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Atau Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran	1000 Orang	866	654	524	579	2623	ORANG	262,30%
7	Penanganan Kebakaran	Response Time 15 Menit Penanganan kebakaran REALIASI BERHASIL/J UMLAH KEJADIAN	11	9	31	42	93	KALI	96,77%
8	Pendataan Pelanggar	Jumlah pelanggar Perda/Perkada	100%	105	51	0	256	ORANG	100%
9	Pembinaan Masyarakat Perda/Perwal	Jumlah Masyarakat yang menerima sosialisasi dan Penyuluhan Perda-Perkada	95	105	26	115	341	ORANG	100%

10	Kegiatan Patroli dan Penertiban Pelanggar	Penurunan Kasus ketentraman dan ketertiban Umum dengan target 800 Kasus	19	186	276	54	713	KASUS	100%
----	---	---	----	-----	-----	----	-----	-------	------

3.3.1 Analisis Capaian Kinerja

Capaian Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi pada Tahun 2023 dikategorikan berhasil dengan capaian target di atas 98,83% baik dalam hal Kinerja Maupun hal penyerapan anggaran dan hasil fisik yang dihasilkan, walaupun dalam hal penganggaran pada Tahun 2023 ini masih ada dampak dari rasionalisasi anggaran karena bencana *Covid 19* namun daripada itu Satpolppdamkar berusaha untuk mencapai target atau tujuan dalam Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum perlindungan Masyarakat serta pelayanan kebakaran dan Non Kebakaran dalam melayani Masyarakat Kota Cimahi,

Gambaran Pelayanan Penyelamatan kebakaran ada peningkatan jumlah kejadian kebakaran yang disebabkan karena adanya kondisi cuaca kemarau yang panjang pada tahun 2023 sampai yang terjadi 93 Kejadian sedangkan ditahun 2022 terjadi 37 Kejadian kebakaran di Kota Cimahi ada kenaikan sekitar 56 kali kejadian kebakaran atau kenaikan 151% kejadian akan tetapi hasil capaian dikategorikan berhasil capaian 97,85% diatas 90%.

Adapun dalam penerapan SPM sesuai dengan peraturan kementerian dalam negeri nomor 59 tahun 2021 telah dijalankan sesuai dengan sebaik baiknya serta pendukungan anggaran untuk SPM tersebut dan pada tahun 2023 ini dalam perubahan anggaran 2023 peningkatan sarana dan prasarana Pemadam kebakaran ada peningkatan dengan

penambahan armada 1 Unit Pemancar pemadam kendaraan kebakaran, serta peningkatan SDM Satpolppdamkar Kota Cimahi telah melaksanakan pembinaan dan pelatihan Pegawai Satpolppdamkar Kota Cimahi, dalam perhitungan capaian dengan formula pengurangan tahun ini dikurangkan capaian tahun lalu ada kenaikan 0,60%.

Tabel 3.9

Evaluasi Pencapaian Sasaran
Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah
(Indikator Kinerja : Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah)

No	Indikator Kinerja (Eselon IV)	Target 2023	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Jumlah perdadibagi perda yang ditegakkan dikali 100%)	48	48	100%
2	Piket/Penjagaan Aset Vital Daerah	12 Bulan	12 bulan	100%
3	Pengamanan Unjuk Rasa (jumlah Penanganan Unjuk rasa dibagi kejadian unjuk rasa dikali 100%)	6 Kali	6 Kali	100%
4	Penertiban Pedagang kaki Lima	12 kali	12 kali	100 %
5	Penurunan Spanduk/Baliho	12 Kali	12 Kali	100%
6	Pengamanan Hari Besar dan Hari Tertentu (HBHT)	6 Kali	6 Kali	100%
7	Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan Non PNS	83 Orang	83Orang	100%
8	Pengawasan/ Pengamanan Daerah rawan PKL	<800kasus	713Kasus	100%
Rata - Rata Capaian				100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari 8 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, delapan indikator kinerja menghasilkan capaian kinerja diatas **100%** atau bermakna sangat berhasil, Secara keseluruhan pencapaian terhadap

indikator sasaran ini berada pada kategori sangat berhasil dengan indeks rata-rata >96. Dengan tingginya capaian indikator kinerja diatas, diharapkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Cimahi dapat tercipta dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah
(Indikator Kinerja : Persentase Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang Aktif)

No	Indikator Kinerja (Eselon II & Eselon IV)	Target 2023	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang Aktif ($\sum$ Anggota Linmas 2022 : 1871 Orang / $\sum$ RT : 1728) * 100%	1,08%	1,08%	100%
2	Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk ($\sum$ Anggota Linmas 2023 : 1871 dibagi $\sum$ Penduduk Cimahi 2023 566.537)	0,33%	0,33%	100%
3	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Cimahi (Jumlah RT*2 personil=	3456 orang	1871 Orang	54,14%
	Rata - Rata Capaian			84,71%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari tiga indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, seluruhnya menghasilkan capaian Kinerja diatas **84,71%** atau bermakna berhasil. Jika melihat capaian indikator kinerja diatas, dapat disimpulkan

bahwa dengan tercapainya ketiga indikator kinerja tersebut diharapkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di masyarakat dapat tercipta secara kondusif.

Namun, dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat sebetulnya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya rekrutment anggota Satlinmas saat ini masih ada pada masing-masing wilayah (Kecamatan dan Kelurahan), belum terpusat di Satpol PP. Hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja Satlinmas. Oleh sebab itu, kedepan diharapkan rekrutment anggota Satlinmas dapat dilaksanakan oleh Satpol PP, dengan menggunakan metode rekrutmen yang lebih selektif, sehingga diharapkan personil Satlinmas yang bertugas merupakan personil yang terpilih dan memiliki kualitas yang lebih baik lagi.

Selain itu, meskipun persentase anggota Satlinmas yang aktif dan rasio anggota Satlinmas terhadap jumlah penduduk sudah mencapai target yang diharapkan (sesuai dengan SPM) akan tetapi pada dasarnya kondisi tersebut masih dianggap kurang. Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, mengamanatkan pelayanan minimal yang wajib dipenuhi oleh kabupaten/kota salah satunya adalah Jumlah anggota Satlinmas minimal 1 orang/RT pada tahun 2014. Secara teori, kuantitas tersebut sudah melebihi dari yang diharapkan. Akan tetapi, jika

melihat kondisi real dilapangan terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kinerja anggota linmas, antara lain:

- 1) Rata-rata usia anggota Satlinmas sudah berada diatas usia produktif sangat mempengaruhi kualitas kinerja Linmas;
- 2) Kondisi, situasi, dan tingkat kerawanan wilayah yang tinggi tidak memungkinkan wilayah (tingat RT) hanya dijaga oleh 1 (satu) orang anggota Linmas.

Mengingat kondisi tersebut, maka kuantitas anggota Satlinmas tidak dapat dijadikan ukuran terciptanya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di wilayah. Akan tetapi harus didukung juga dengan kualitas anggota Satlinmas tersebut. Oleh karena itu, Satpol PP sebagai pembina harus meningkatkan kualitas anggota Satlinmas yang ada dengan memberikan wawasan baik melalui pembinaan maupun pendidikan dan pelatihan.

Tabel 3.11

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah
(Indikator Kinerja : Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah Yang Diselesaikan)

No	Indikator Kinerja (Eselon II & Eselon IV)	Target 2023	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Diselesaikan (Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan : 713 kasus / Jumlah Pelanggaran Perda : 713 kasus dikali 100%)	800	713	100%
2	Sidang Tipiring	10 kali	9 kali	90%
3	Gerakan Disiplin Daerah	2 kali	2 kali	100%

No	Indikator Kinerja (Eselon II & Eselon IV)	Target 2023	Realisasi	Capaian Kinerja
4	Penegakan Perda dan Peraturan Walikota	10 Kali	10 Kali	100%
5	Tenaga Pendukung Administrasi (THL)	12 Bulan	12 Bulan	100%
Rata - Rata Capaian				98,00%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari lima indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, hampir seluruhnya menghasilkan capaian kinerja diatas 85% atau bermakna sangat berhasil dengan adanya indikator ini bertujuan untuk menurunkan atau adanya penurunan pelanggaran pelanggaran perda yang terjadi diwilayah Kota Cimahi, dengan tingginya capaian indikator kinerja sasaran ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat Kota Cimahi baik perorangan maupun badan hukum, serta masyarakat yang berdomisili di Kota Cimahi maupun dari luar Kota Cimahi untuk mentaati peraturan dan kebijakan yang berlaku di Kota Cimahi. Sehingga, peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah dapat ditegakkan secara optimal.

Tabel 3.12
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase pemenuhan waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	96,77%	96,77%
2	Persentase penanggulangan kebakaran yang berhasil meminimalisir kerusakan bangunan di bawah 50%	100%	100%	100%
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Cimahi	100%	100%	100%
4	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki standar kualifikasi Pemadam	100%	56,40%	56,40%
Rata - Rata Capaian				88,29%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari empat indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, empat indikator capaian kinerja diatas 85% atau bermakna sangat berhasil.

Tabel 3.13
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Upaya Penyelamatan Korban Kebakaran dan Bencana Lainnya

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase Jumlah Korban Kebakaran yang Terhindar dari Luka Berat	100%	100%	100%
	Rata - Rata Capaian			100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, capaian kinerjanya diatas 85% atau bermakna sangat berhasil. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan masyarakat siaga bencana kebakaran (Magakar) yang telah diberikan pelatihan oleh Damkar, dimana Magakar yang sudah dilatih dapat bertindak lebih awal untuk memadamkan api dan menyelamatkan korban bilamana terjadi kebakaran.

Tabel 3.14
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase penurunan kejadian kebakaran akibat kelalaian manusia	5%	5%	100%
	Rata - Rata Capaian			100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan capaian kinerjanya 91,51% atau sangat berhasil. Meskipun demikian, tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran masih harus ditingkatkan melalui sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran.

Tabel 3.15
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran Melalui
Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Jumlah Masyarakat Siaga Kebakaran	1000	2623	262,3%
	Rata - Rata Capaian			262,3%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan capaian kinerjanya diatas 85% atau dalam kategori Sangat berhasil. Seperti telah dijelaskan pada evaluasi sasaran sebelumnya, bahwa Masyarakat Siaga Kebakaran (magakar) sangat berperan penting dan membantu pelaksanaan tugas Damkar dalam mengurangi resiko bahaya kebakaran (seperti : mencegah api membesar, mengurangi persentase korban luka berat, mengurangi persentase, dan sebagainya), sehingga lebih banyak Magakar maka diharapkan kejadian kebakaran dapat dengan segera diatasi dari awal dan persentase korban kebakaran dapat diminimalisir

atau bahkan tidak ada sama sekali, sebagai tindak lanjut untuk tahun 2024 akan dibentuk satlakar ini akan dibentuk untuk masyarakat yang bukan hanya menerima sosialisasi dan penyuluhan saja akan tetapi mendapatkan pelatihan serta pembinaan khusus dari Bidang pemadam kebakaran Kota Cimahi.

3.3.2 Realisasi Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2023 memiliki 3 Program yang terbagi di sekretariat 1 Bidang dan di Bidang sebanyak 2 Program, dengan total kegiatan sebanyak 13 kegiatan, tersebar di bidang sebanyak 6 kegiatan dan di sekretariat sebanyak 7 kegiatan dan dengan jumlah sub kegiatan keseluruhan sebanyak 37 sub kegiatan. Adapun anggaran Perubahan Tahun 2023 sebesar 31.727.986.802,-.

Program yang terkait langsung dengan pelaksanaan SPM antara lain program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

I PROGRAM :		PROGRAM	PENUNJANG	URUSAN
		PEMERINTAHAN		DAERAH
		KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		

Urusan Pemerintah Daerah

- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PROGRAM : PROGRAM Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Kegiatan
- 1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 3 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

PROGRAM : PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- Kegiatan
- 1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - 3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Tabel 3.16

**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2023**

Kode					Uraian/ Bidang Uraian Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Uraian hasil kegiatan	Rencana Tahun 2023				Realisasi Anggaran Perubahan 2023	% Capaian Realisasi Anggaran
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran Perubahan TA 2023		
											Program	Keluaran Sub Kegiatan			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								31.727.986.802	30.342.051.076	95,63%
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								21.036.013.302	19.901.657.896	94,61
1	05	01	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								798.912.100	770.023.050	96,38%
5	05	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja,Renstra,Forum SKPD/FGD	Kota Cimahi	100 Persen	3 Dokumen	54.828.500	53.428.450	97,45%
5	05	01	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran	Kota Cimahi	100 Persen	4 Dokumen	24.600.200	23.300.200	94,72%
5	05	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen LKIP,LKPJ,MONEV KINERJA BULANAN/TRIWUL	Kota Cimahi	100 Persen	22 Laporan	719.483.400	693.294.400	96,36%

Kode					Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Uraian hasil kegiatan	Rencana Tahun 2023				Realisasi Anggaran Perubahan 2023	% Capaian Realisasi Anggaran
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran Perubahan TA 2023		
											Program	Keluaran Sub Kegiatan			
									AN/TAHUN, SOP, SKM, MANAJEMEN RISIKO,SPM						
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15.320.404.582	15.503.575.524	94,67%
5	05	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Kota Cimahi	100 Persen	121 Pegawai ASN	15.239.340.282	14.425.225.674	94,66%
5	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan			1 Laporan	10.225.950	8.963.500	87,65%
5	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan anan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan anan/Semester an	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan			18 Laporan	70.838.350	69.386.350	93%
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								367.759.950	360.382.800	97,99%
5	05	01	2.05	11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang	Kota Cimahi	100 Persen	198 Orang	173.652.000	172.216.800	99,17%
5	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket			207 Paket	194.107.950	188.166.000	96,94%
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								682.199.450	629.672.608	92,30%
5	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket	Kota Cimahi		Paket	13.873.000	11.658.000	84,03%
5	05	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan	Nilai SAKIP	Tersedianya	Jumlah Paket Peralatan dan	Jumlah Paket	Kota Cimahi		Paket	376.204.000	368.477.250	97,95%

Kode					Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Uraian hasil kegiatan	Rencana Tahun 2023				Realisasi Anggaran Perubahan 2023	% Capaian Realisasi Anggaran
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran Perubahan TA 2023		
											Program	Keluaran Sub Kegiatan			
			6		dan Perlengkapan Kantor	Perangkat Daerah	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
5	05	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket	Kota Cimahi		Paket	44.200.000	43.656.000	98,77%
5	05	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1. Jenis Cetak Tata naskah dinas ,2. jumlah Bulan Penyediaan Penggandaan dan Cetak Cover 3. Cetak Sticker Label Barang Bukti, 4. Cetak Sticker ditutup, 5.Polpp Line 6. Cetak nomor Lyanan Darurat, 7. Cetak Stiker Segel			Paket	63.509.450	46.564.550	73,32%
5	05	01	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan			12 Laporan	3.000.000	2.030.000	67,67%
5	05	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan			12 Laporan	181.413.000	157.286.808	86,70
1	05	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.454.518.000	2.443.067.200	99,53%
5	05	01	2.0 7	05	Pengadaan mebel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit			4 Unit	74.518.000	73.748.200	98,97%
5	05	01	2.0 7	09	Pengadaan Gedung dan Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit			4 Unit	140.000.000	136.819.000	97,73
5	05	01	2.0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya kemdaraan Damkar	Jumlah Unit	Jumlah Unit			1 Unit	2.240.000.000	2.232.500.000	99,67%
1	05	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								380.964.000	302.090.864	79,30%
5	05	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan			12 Laporan	42.600.000	42.500.000	99,77%
5	05	01	2.0 8	02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan			12 Laporan	55.999.000	23.681.768	42,29%

Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Uraian hasil kegiatan	Rencana Tahun 2023				Realisasi Anggaran Perubahan 2023	% Capaian Realisasi Anggaran
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran Perubahan TA 2023		
											Program	Keluaran Sub Kegiatan			
5	05	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan			12 Laporan	282.365.000	235.909.096	83,55%
1	05	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah								1.031.255.220	892.845.850	86,58%
5	05	01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1. Jumlah bulan izin Spektrum Radio (ISR), 2. Jumlah Kendaraan Operasional yang diasuransikan, 3. Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara			67 Unit	964.281.720	829.695.850	86,04%
5	05	01	2.0 9	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Unit			52 unit	66.973.500	63.150.000	94,29%
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								8.831.785.200	8.591.507.00	97,28%
1	05	02	2.0 1		Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								7.099.462.400	6.883.810.000	96,96%
5	05	02	2.0 1	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1. Jumlah Pelaksanaan Pekat, 2. Jumlah Pelaksanaan Penertiban PKL, 3. Jumlah Penanganan Unjuk Rasa, 4. Pelaksanaan Penertiban Anak sekolah, 5. Penertiban bangunan Liar, 6. Penertiban Spanduk/Baligho,P engamanan Pemilu dan Pilkada tahun 2024	Kota Cimahi	100 Persen	800 Kasus	1.295.341.600	1.238.682.000	95,63%

Kode					Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Uraian hasil kegiatan	Rencana Tahun 2023				Realisasi Anggaran Perubahan 2023	% Capaian Realisasi Anggaran
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran Perubahan TA 2023		
											Program	Keluaran Sub Kegiatan			
5	05	02	2.0 1	03	Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1. Jumlah Pelibatan Linmas dalam Peringatan HBHT, 2. Peringatan HUT Linmas Tingkat Kota	Kota Cimahi	100 Persen	3 Dokumen	5.441.912.800	5.302.720.000	97,44%
5	05	02	2.0 1	04	Pemberdayaan Pelindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah Pembinaan Anggota linmas, 2. Jumlah Pendataan Anggota Linmas	Kota Cimahi	100 Persen	4 Dokumen	31.160.000	31.160.000	100%
5	05	02	2.0 1	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen	Kota Cimahi	100 Persen	6 Dokumen	311.248.000	311.248.000	100%
5	05	02	2.0 1	09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Layanan dalamrangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1. Jumlah Pelayanan Kerugian Materil, 2. Jumlah Pelayanan Pengobatan	Kota Cimahi	100 Persen	1 laporan	19.800.000	0	0%
1	05	02	2.0 2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota								1.723.022.800	1.700.697.100	98,70%
1	05	02	2.0 2	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1. Jumlah Pembinaan Pelanggaran Perda, 2. Jumlah Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban	Kota Cimahi	100 Persen	12 Laporan	892.317.600	881.907.800	98,83%

Kode					Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Uraian hasil kegiatan	Rencana Tahun 2023				Realisasi Anggaran Perubahan 2023	% Capaian Realisasi Anggaran
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran Perubahan TA 2023		
											Program	Keluaran Sub Kegiatan			
1	05	02	2.0 2	02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1. Jumlah pendataan Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum, 2. Jumlah Pengawasan Pelanggaran Perda, 3. Papan Himbauan,	Kota Cimahi	100 Persen	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	100%
1	05	02	2.0 2	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1. Jumlah Penegakan Perda dan Peraturan Walikota, 2. Jumlah Sidang Tindak Pidana Ringan	Kota Cimahi	100 Persen	12 Laporan	815.705.200	803.789.300	98,54%
1	05	02	2.0 3		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota								9.300.000	7.000.000	75,27%
1	05	02	2.0 3	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1. Jumlah Pelaksanaan peningkatan Kapasitas PPNS dan Petugas Penegakan Perda	Kota Cimahi	100 Persen	1 Laporan	9.300.000	7.000.000	75,27%
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								3.262.996.400	3.229.368.480	98,97%
1	05	04	2.0 1		Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								1.505.357.500	1.494.055.280	99,25%

Kode					Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Uraian hasil kegiatan	Rencana Tahun 2023				Realisasi Anggaran Perubahan 2023	% Capaian Realisasi Anggaran
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran Perubahan TA 2023		
											Program	Keluaran Sub Kegiatan			
1	05	04	2.0 1	01	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah patroli siaga kebakaran dan penyelamatan korban	Kota Cimahi	100 Persen	12 Dokumen	1.293.720.000	1.292.740.000	99,92%
1	05	04	2.0 1	02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. cairan kimia AFF 3%/6%, 2. Jumlah APD khusus kebakaran	Kota Cimahi	100 Persen	Paket	203.176.500	193.095.280	95,04%
1	05	04	2.0 1	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non kebakaran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1. Jumlah APD khusus penyelamatan dan evakuasi, 2. Jumlah Sarpras Penyelamatan dan Evakuasi lainnya	Kota Cimahi	100 Persen	Paket	8.461.000	8.220.000	97,15%
1	05	04	2.0 2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran								320.214.700	320.214.700	100%
1	05	04	2.0 2	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedu ng/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Potensi Bangunan Gedung yang wajib diperiksa	Kota Cimahi	100 Persen	295 Gedung	304.614.700	304.614.700	100%
1	05	04	2.0 2	02	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.Jumlah Pemeriksaan alat proteksi kebakaran	Kota Cimahi	100 Persen	12 Dokumen	15.600.000	15.600.000	100%

Kode					Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Uraian hasil kegiatan	Rencana Tahun 2023				Realisasi Anggaran Perubahan 2023	% Capaian Realisasi Anggaran
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran Perubahan TA 2023		
											Program	Keluaran Sub Kegiatan			
						Kebakaran									
1	05	04	2.0 4		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							34.616.100	34.616.100	100%	
1	05	04	2.0 4	01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kota Cimahi	100 Persen	1000 Orang	34.616.100	34.616.100	100%

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2023 ini, dapat Kami simpulkan, bahwa Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dengan capaian Realisasi Anggaran 95,63% dikatakan berhasil, dengan target indikator capaian yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan evaluasi dan analisis Renja Perubahan 2023 terhadap Renstra 2023-2026 indikator sasaran kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, maka hal ini menunjukkan *trend* prestasi pada tahun 2023, meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator sasaran yang memiliki tingkat capaian kinerja belum sesuai dengan harapan atau <85%. Sebagai bentuk perbaikan atau solusi atas kekurangan tersebut, maka upaya yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pada indikator kinerja dengan persentase dibawah 85%, maka harus diintensifkan melalui koordinasi dan komunikasi diinternal Satpol PP dan Damkar, agar pelaksanaan capaian indikator kinerja dapat diraih melalui pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.
2. Pentingnya monitoring dan evaluasi dalam menangani berbagai permasalahan dan hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan program kegiatan sebagai alat pencapaian target indikator kinerja yang diinginkan.

3. Mengoptimalkan peran staf atau seluruh unsur yang akan melaksanakan tugas, agar optimal pula pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan merujuk kepada Pohon Kinerja serta telaahan Manajemen Risiko yang telah dibuat pada tahun 2023, guna mengoptimalkan capaian yang akan dicapai, serta capaian pada tahun 2023 sebagai tolak ukur pencapaian Kinerja pada tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka secara umum perbaikan pada tahun ke depan yaitu :

- a. Pentingnya upaya segera untuk mengorganisasikan pelaksanaan rencana aksi dilengkapi upaya monitoring dan evaluasi untuk pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan;
- b. Upaya segera dibuatkan Manajemen Risiko, Pohon Kinerja guna mendorong secara optimal dalam pencapaian kinerja serta sasaran yang akan dicapai;
- c. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki agar berdayaguna dan berhasilguna dalam pencapaian indikator kinerja;
- d. Membuat dan menerapkan SOP untuk pelaksanaan capaian indikator kinerja apabila dimungkinkan;
- e. Meningkatkan kemampuan aparatur, baik pada perilaku kerja maupun kemampuan melaksanakan tugas sesuai kebutuhan organisasi.

Dari seluruh indikator sasaran Misi tersebut, diketahui bahwa rata-rata keseluruhan realisasi capaian sasaran indikator kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2023 sebesar Persentase Keuangan 95,63% dan Persentase Fisik 99,73%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan capaian indikator kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi mencapai skala angka > 85% atau dalam kategori sangat berhasil.

Berkaitan dengan indikator kinerja yang belum sesuai dengan keinginan dan harapan, itu tentunya merupakan kelemahan karena ketidaksempurnaan kami sebagai manusia. Mudah-mudahan kedepan, dengan adanya kekurangan dan kelebihan yang ada pada tahun ini, dapat menjadi motivasi dan pendorong untuk melakukan tugas dan tanggungjawab lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2023 ini dibuat untuk memenuhi salah satu dasar penilaian kinerja, khususnya kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi.

Cimahi, Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI**



Ganis Komarianto, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196409011987031021